

Women's Representation in Regional Elections: Gendered Institutions' Perspective on Political Design and Practice

Representasi Perempuan Dalam Pilkada: Perspektif Gendered Institutions Terhadap Desain Dan Praktik Politik

Rudi Nasrudin¹, Ratnia Solihah², Yugni Maulana Aziz³

^{1,2,3} Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

Corresponding Author: rudi.nasrudin@mail.unpad.ac.id

Abstract

Women's political representation in local elections (PILKADA) indicates the quality of democracy and the level of gender equality in political institutions. Although gender quotas have increased the number of female candidates, their substantive representation remains low. This study aims to analyze how gendered political institutions influence a qualitative approach based on secondary data research and thematic analysis. Additionally, it examines the elements of gender-focused institutions identified by Joan Acker, which include division of labor, division of power, symbols and discourses, interpersonal relations, and internal mental work. The results prove that structural and cultural challenges still limit women's participation in the electoral political arena. (1) Division of labor, women tend to be pushed into non-strategic campaign roles, strengthening traditional role stereotypes, (2) division of power, women's access to decision-making is limited due to the dominance of male political elites and political dynasties; (3) symbols and discourses, campaign narratives and public representation are still gender-biased, limited to considering women's existence as supporters not leaders; (4) interpersonal relations, informal political networks are masculine and exclusive, marginalizing women from power networks and (5) internal mental work, that social norms and internal expectations create hesitation for women to show themselves as major political actors. Based on these results above, this research can strengthen the understanding that increasing women's representation in quantity is not enough without being accompanied by institutional transformation and political culture. In addition, this study also emphasizes that there needs to be a comprehensive reform of political design and practice to be more inclusive of women's leadership.

Keywords: Women's Representation; Regional Elections; Gendered Institution Perspective

Abstrak

Representasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) mencerminkan kualitas demokrasi dan tingkat kesetaraan gender dalam institusi politik. Meskipun kuota gender telah meningkatkan jumlah calon perempuan, representasi substansial mereka tetap rendah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana institusi politik yang berorientasi gender memengaruhi pendekatan kualitatif berdasarkan penelitian data sekunder dan analisis tematik. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi unsur-unsur institusi berorientasi gender yang diidentifikasi oleh Joan Acker, meliputi pembagian tugas, pembagian kekuasaan, simbol dan diskursus, hubungan interpersonal, serta kerja mental internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan struktural dan budaya masih membatasi partisipasi perempuan di arena politik pemilihan umum. (1) Pembagian tugas, perempuan cenderung didorong ke peran kampanye non-strategis, memperkuat stereotip peran tradisional; (2) pembagian kekuasaan, akses perempuan ke pengambilan keputusan dibatasi oleh dominasi elit politik laki-laki dan dinasti politik; (3) simbol dan diskursus, narasi kampanye dan representasi publik masih bias gender, terbatas pada pengakuan keberadaan perempuan sebagai pendukung bukan pemimpin; (4) Hubungan interpersonal, jaringan politik informal bersifat maskulin dan eksklusif, mengucilkan perempuan dari jaringan kekuasaan, dan (5) kerja mental internal, norma sosial dan ekspektasi internal menciptakan keraguan bagi perempuan untuk tampil sebagai aktor politik utama. Berdasarkan hasil di atas, penelitian ini dapat memperkuat pemahaman bahwa peningkatan representasi perempuan dalam jumlah saja tidak cukup tanpa disertai dengan transformasi institusional dan budaya

politik. Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa diperlukan reformasi komprehensif dalam desain dan praktik politik agar lebih inklusif terhadap kepemimpinan perempuan.

Kata kunci: *Representasi Perempuan; Pilkada; Perspektif Institusi Gender*

1. Pendahuluan

Perwakilan perempuan dalam politik merupakan cerminan penting dari demokrasi substansial dan kesetaraan gender. Salah satu cara utama untuk mempromosikan representasi perempuan adalah melalui penetapan kuota gender. Sebuah studi menunjukkan bahwa kuota gender seringkali meningkatkan representasi perempuan dalam jabatan terpilih, sehingga membantu mengatasi underrepresentation historis perempuan dalam politik. Misalnya, studi (Kunovich & Paxton, 2005; Merdanović & Delalić, 2023; Paxton et al., 2010), menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan kuota mengalami pertumbuhan signifikan dalam kehadiran perempuan di legislatif dibandingkan dengan yang tidak. Selain itu, kuota ini sangat penting dalam menyeimbangkan lapangan permainan dalam proses seleksi calon partai politik, yang merupakan mekanisme penyaringan kritis dalam banyak demokrasi (Chatun, 2023; Popov Momčinović, 2023).

Perwakilan perempuan dalam posisi politik masih menjadi tantangan global yang mendesak. Menurut laporan *Inter-Parliamentary Union* tahun 2023, perempuan hanya menduduki 26,5% kursi parlemen di seluruh dunia (Ghafoor et al., 2023). Kesenjangan gender ini terlihat di berbagai wilayah, terutama di negara-negara berkembang di mana hambatan budaya, struktural, dan sistemik masih berlanjut, menghambat partisipasi politik perempuan seperti Indonesia. Studi menunjukkan bahwa norma gender tradisional sangat mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik, seringkali membatasi mereka pada peran domestik dan memperkuat persepsi masyarakat yang meragukan kemampuan

kepemimpinan mereka (Ghafoor et al., 2023; Soetjipto, 2023).

Data dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan gambaran tentang perkembangan calon perempuan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2015, hanya 7,47% calon yang merupakan perempuan, yang mencerminkan hambatan signifikan yang dihadapi perempuan dalam memasuki dunia politik (Soetjipto, 2023). Kemajuan terlihat pada Pilkada 2020, di mana persentase ini meningkat menjadi sekitar 10,7%. Secara mencolok, Pilkada 2024 menandai pergeseran yang lebih substansial, dengan 309 calon perempuan berpartisipasi, mewakili sekitar 19,92% dari total calon (Wiryo & Setuningsih, 2025). Meskipun terdapat tren positif, hasil Pilkada 2024 menyoroti tantangan yang masih berlangsung, salah satu tantangan tersebut yaitu hanya 109 di antaranya berhasil lolos ke tahap pemilihan berikutnya, dan pada akhirnya, hanya 45 perempuan terpilih sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah (Tuti, 2025). Angka ini setara dengan sekitar 8% dari total posisi yang diperebutkan dalam pemilihan (Pancawati, 2025). Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah calon perempuan terus meningkat, hasil aktual dalam hal posisi yang terpilih tidak mencerminkan peningkatan yang sebanding, menunjukkan adanya hambatan yang persisten dalam proses pemilihan.

Desain institusi politik Indonesia, meskipun tampak netral, pada dasarnya diskriminatif terhadap perempuan (Rhoads, 2012). Dalam studi Yandra (2017), dicontohkan bahwa status kependudukan dan batas wilayah administratif dalam PILKADA

di Pekanbaru menyebabkan beberapa warga kehilangan hak pilihnya, hal ini mencerminkan desain institusi politik ditingkat lokal yang masih bias terhadap kelompok tertentu, terutama perempuan (Yandra, 2017). *Landscap* politik sering kali didominasi oleh norma-norma patriarkal yang menguntungkan calon laki-laki. Kerangka institusional memperkuat biaya politik yang tinggi dan sistem patronase yang memprioritaskan jaringan laki-laki yang sudah mapan, sehingga menciptakan hambatan signifikan bagi perempuan yang ingin masuk ke dunia politik (Khoiriyah, 2020; Kim, 2019; Shaheen, 2021). Ini sama halnya ketika studi lain mengaitkan desain politik dengan kaum termarginalkan seperti disabilitas, beberapa keluarga tidak memperbolehkan anggota keluarga penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilihan ketidakhadiran karena merasa malu (Ningsih et al., 2024).

Hambatan ini semakin diperparah oleh ekspektasi masyarakat yang menganggap peran politik sebagai hal yang maskulin, sehingga perempuan dipinggirkan ke posisi sekunder dalam diskursus politik (Thomas & Bond, 2015; Toyibah, 2017). Oleh karena itu, meskipun tingkat partisipasi meningkat, representasi substansial yang mendalam menjadi jelas. Selain itu, partisipasi politik perempuan bukan hanya soal representasi numerik, tetapi juga tentang kualitas dan dampak kehadiran mereka di ruang politik. Meskipun perempuan dapat mencalonkan diri dalam politik, mereka sering terlibat dalam sistem ini dengan cara yang mencerminkan dinamika kekuasaan yang ada daripada menantanginya. Situasi ini menyoroti kebutuhan akan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana institusi politik beroperasi dan memengaruhi perempuan secara berbeda, dengan mempertimbangkan konteks budaya di mana mereka beroperasi (Aspinall et al., 2021; Dzinnun et al., 2024).

Konsep institusi berorientasi gender, sebagaimana diusulkan oleh Acker, menunjukkan bahwa organisasi dan birokrasi bukanlah entitas netral, melainkan secara fundamental dibentuk oleh norma dan praktik berorientasi gender (Acker, 1992). Institusi-institusi ini mewakili nilai, norma, dan asumsi yang mempertahankan ketidaksetaraan gender, yang tercermin dalam berbagai cara dalam struktur dan budaya tempat kerja. Konsep organisasi berorientasi gender mendapatkan dukungan dari Tatli dkk., yang menegaskan bahwa perubahan kondisi politik dan ekonomi di negara-negara seperti China menyoroti hierarki gender tradisional yang diperkuat melalui struktur organisasi. Temuan mereka menunjukkan bahwa munculnya ideologi pasar bebas telah menyebabkan dinamika gender yang lebih kompleks, menggambarkan bagaimana kerangka kerja organisasi beradaptasi atau menentang norma gender yang berubah (Tatli et al., 2017). Hal ini mendukung teori Acker dengan menunjukkan bagaimana sistem sosial-ekonomi eksternal memengaruhi struktur gender dasar di tempat kerja.

Studi terkait ketimpangan gender dalam institusi sosial telah berkembang pesat, terutama sejak adanya pendekatan *gendered institutions* yang dikemukakan oleh Joan Acker dan dikembangkan dalam berbagai konteks studi seperti di bidang kesehatan, organisasi politik, dan akademik. Penelitian dari Browne & Misra (2020) menunjukkan bahwa struktur rasial dan gender saling tumpang tindih dalam membentuk ketimpangan kesehatan bagi perempuan kulit berwarna. Sementara itu, penelitian Szulc dan Domański (2021) berorientasi pada kinerja akademik perempuan selama pandemik di institusi pendidikan tinggi. Krook dan Mackay (2011) mengkaji norma institusional berbasis gender dalam bidang ilmu politik. Namun, ketiga penelitian tersebut belum menjangkau ruang lingkup institusi politik elektoral di negara berkembang.

Riset ini mengisi celah tersebut dengan memfokuskan pada PILKADA Indonesia tahun 2024, sebagai arena penting yang merepresentasikan desain dan praktik politik dalam mereproduksi ketimpangan gender secara institusional. Dengan menggunakan kerangka *gendered institutions*, riset ini tidak hanya memetakan representasi perempuan secara statistik, tetapi menyelami bagaimana norma, struktur, dan interaksi dalam proses pencalonan, kampanye, dan budaya politik lokal memperkuat subordinasi perempuan dalam politik lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan empiris, konseptual, dan kontekstual dalam kajian gender dan kelembagaan politik kontemporer.

2. Perspektif Teori

Gendered Institutions

Konsep institusi berorientasi gender, sebagaimana diusulkan oleh Acker, menunjukkan bahwa organisasi dan birokrasi bukanlah entitas netral, melainkan secara fundamental dibentuk oleh norma dan praktik berorientasi gender (Acker, 1992). Institusi-institusi ini mewakili nilai, norma, dan asumsi yang mempertahankan ketidaksetaraan gender, yang tercermin dalam berbagai cara dalam struktur dan budaya tempat kerja. Ide ini sangat penting untuk memahami bagaimana lingkungan profesional memengaruhi dinamika dan hasil gender bagi individu dari berbagai jenis kelamin. Lima dimensi *gendered institutions* menurut Joan Acker (1992) antara lain:

1. *Division of labor* – pembagian kerja politik didasarkan pada peran gender.
2. *Division of power* – aksesibilitas ke pengambilan keputusan politik.
3. *Symbols and discourses* – narasi politik dan simbol-simbol kampanye yang bias gender.
4. *Interpersonal relations* – pola interaksi elite politik yang sering kali eksklusif dan maskulin.

5. *Internal mental work* – persepsi, norma, dan ekspektasi politik dibentuk oleh nilai-nilai gender.

Konsep organisasi berorientasi gender mendapat dukungan dari Tatlı dkk., yang menegaskan bahwa perubahan kondisi politik dan ekonomi di lingkungan seperti China menyoroti hierarki gender tradisional yang diperkuat melalui struktur organisasi. Temuan mereka menunjukkan bahwa munculnya ideologi pasar bebas telah menyebabkan dinamika gender yang lebih kompleks, menggambarkan bagaimana kerangka kerja organisasi beradaptasi atau menentang norma gender yang berubah (Tatlı et al., 2017). Hal ini mendukung teori Acker dengan menunjukkan bagaimana sistem sosial-ekonomi eksternal memengaruhi struktur gender dasar di tempat kerja.

Williams dkk. (2012) menganalisis bagaimana struktur yang berkembang seperti lingkungan berbasis tim dapat mengurangi beberapa ketidaksetaraan gender. Namun, mereka memperingatkan bahwa perempuan seringkali masih menghadapi hambatan di lingkungan yang didominasi laki-laki, memperkuat gagasan bahwa meskipun organisasi mungkin menunjukkan potensi perubahan, norma gender yang mendalam tetap menjadi tantangan signifikan (Williams et al., 2012). Hal ini menyoroti argumen Acker tentang persistennya logika institusional berbasis gender meskipun ada reformasi struktural. Cooper dkk. menguraikan dimensi gender dalam suara di tempat kerja, mengungkapkan bahwa persepsi tentang pengaruh dan konsultasi dalam proses pengambilan keputusan seringkali dipengaruhi oleh norma gender dalam organisasi. Penelitian mereka menunjukkan bahwa praktik organisasi dapat mempertahankan ketidaksetaraan gender, menguatkan argumen Acker tentang sifat meresap institusi gender dan dampaknya pada agen dan otonomi karyawan (Cooper et al., 2021). Struktur institusional yang

mengarahkan interaksi di tempat kerja dan proses pengambilan keputusan sehingga mencerminkan dan mempertahankan hierarki gender yang sudah ada.

3. Metode

Desain penelitian kualitatif diterapkan untuk memahami kompleksitas representasi perempuan dalam lanskap politik Indonesia. Desain ini memfasilitasi pemahaman mendalam tentang pengalaman individu, persepsi masyarakat, dan praktik institusional yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam proses pemilihan. Data akan dikumpulkan melalui *secondary data research*. Analisis Dokumen, ini akan melibatkan tinjauan literatur yang ada, seperti database artikel dari google scholar <https://scholar.google.com/>, dan <https://www-scopus-com/>, media berita, website resmi pemerintah, dan lainnya untuk menganalisis kerangka kerja yang mengatur partisipasi perempuan dan kepatuhan terhadap kuota gender yang tercantum dalam dokumen legislatif (Asmawi & Devi, 2023; Purwanti & Teti Hadiati, 2022).

Data kualitatif yang dikumpulkan akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan wawasan kunci mengenai representasi politik perempuan dalam pemilu 2024. Analisis ini akan menggunakan perspektif gender untuk mengevaluasi bagaimana praktik institusional, norma sosial, dan pengalaman individu membentuk lanskap politik bagi perempuan di Indonesia. Tema-tema utama mungkin mencakup interaksi antara budaya dan politik, efektivitas kuota gender, dan hambatan yang dihadapi perempuan dalam memasuki politik (Rahmanto et al., 2021; Umbase et al., 2023). Selain itu, mempertimbangkan faktor-faktor seperti implikasi politik dari norma patriarki dan kekuatan gerakan feminis dalam meningkatkan representasi perempuan akan memperdalam analisis (Dzinnun et al., 2024; Riastri Haryani, 2023). Temuan analisis ini

akan dikontekstualisasikan dalam kerangka kerja yang ada mengenai gender dan inklusi politik dalam demokrasi Indonesia (Kalembang, 2024).

4. Hasil dan Pembahasan

Division of labor – Pembagian kerja politik didasarkan pada peran gender.

Dalam lanskap politik Indonesia, pembagian peran sangat dipengaruhi oleh gender, di mana perempuan seringkali dibatasi oleh norma-norma sosial yang mengagungkan kepemimpinan laki-laki (Alfirdaus & Nugroho, 2019; Soetjipto, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa hambatan sistemik terus menghambat kemajuan perempuan dalam mencapai posisi kekuasaan politik, seringkali menempatkan mereka pada peran pendukung atau peran yang dianggap secara tradisional 'feminin' (Soetjipto, 2023). Misalnya, perempuan mungkin didorong untuk berpartisipasi dalam kampanye sebagai penggerak akar rumput atau dalam peran non-pengambilan keputusan daripada sebagai calon untuk jabatan publik. Hal ini menyebabkan turunnya kualitas demokrasi dan melemahkan posisi strategis perempuan untuk berpartisipasi dalam politik (Yandra et al., 2023).

Selain itu, perspektif budaya memainkan peran penting dalam memahami dinamika ini. Studi menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dari negara asal perempuan sering memengaruhi keterlibatan politik dan pembagian kerja mereka (Frank & Hou, 2015). Dalam konteks sosio-politik Indonesia, pengaruh norma tradisional tercermin dalam ekspektasi yang ditempatkan pada perempuan terkait peran sosial dan aspirasi politik mereka (Soetjipto, 2023). Ketika perempuan dipandang terutama sebagai pengasuh atau penopang komunitas, peluang pencalonan dan kesuksesan elektoral mereka berkurang secara signifikan (Alfirdaus & Nugroho, 2019). Akibatnya, hal ini menghambat representasi

yang adil bagi perempuan di lembaga politik lokal maupun nasional.

Hambatan terhadap partisipasi perempuan muncul dalam berbagai bentuk, termasuk batasan sosio-budaya, bias gender, dan praktik-praktik yang terinstitusionalisasi di dalam partai politik (Peng, 2022; Soetjipto, 2023). Misalnya, partai politik seringkali lebih memilih calon laki-laki yang dianggap lebih layak karena adanya bias sosial yang sudah ada (Nourani et al., 2019). Ketiadaan sistem dukungan yang kuat seperti bimbingan, pelatihan, dan dukungan finansial bagi calon perempuan semakin memperparah tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengejar aspirasi politik. Dinamika ini telah menyebabkan underrepresentation yang signifikan dari perempuan dalam posisi elektif dan penunjukan, meskipun kerangka hukum seperti kuota gender sudah ada.

Division of power – Akseibilitas ke pengambilan keputusan politik.

Di Indonesia, lanskap politik sangat dipengaruhi oleh norma-norma patriarki dan dinasti politik, yang dapat membatasi akses perempuan terhadap peran pengambilan keputusan (Wardani & Subekti, 2021). Sifat mengakar dari struktur yang didominasi laki-laki ini melanggengkan siklus di mana perempuan sering kali kekurangan sumber daya keuangan, jaringan politik, dan visibilitas yang diperlukan untuk berhasil dalam pemilu. Dinasti politik menjadi penghalang yang nyata, di mana keluarga yang mapan memanfaatkan pengaruh dan afiliasi mereka, yang secara tidak proporsional menguntungkan kandidat laki-laki sambil meminggirkan perempuan yang memenuhi syarat dari pencalonan politik (Wardani & Subekti, 2021).

Studi menunjukkan bahwa akses ke kekuasaan politik terkait erat dengan sumber daya ekonomi, di mana kandidat dari latar belakang kaya cenderung berkinerja lebih baik karena koneksi sosial mereka yang mapan

dalam jaringan politik. Akibatnya, perempuan yang melangkah ke arena politik terutama mereka yang tidak memiliki koneksi atau dukungan finansial menghadapi hambatan yang lebih tinggi. Situasi ini menunjukkan keterbatasan yang dihadapi perempuan karena peran gender historis dan menyoroti perlunya reformasi dalam struktur partai untuk mendorong representasi yang adil (Sijapati & Mishra, 2023). Hambatan struktural yang diamati di Indonesia mencerminkan tren global yang lebih luas, di mana kemampuan perempuan sering kali dibayangi oleh ekspektasi masyarakat. Pemberdayaan perempuan tetap ambigu tanpa akses substantif terhadap pengambilan keputusan (Syammaella et al., 2024).

Budaya politik Indonesia sangat memengaruhi bagaimana perempuan dipersepsikan dan diperlakukan di bidang politik. Studi menunjukkan bahwa ketika perempuan berupaya memasuki ruang politik, mereka tidak hanya menghadapi hambatan sosial-politik tetapi juga stereotip gender yang berlaku yang mendikte norma kepemimpinan (Galea & Gaweda, 2018). Dalam banyak kasus, kerangka masyarakat memposisikan perempuan sebagai pemimpin yang kurang cakap, sehingga memengaruhi kepercayaan diri dan kemauan mereka untuk mengikuti pemilihan umum. Bahkan ketika perempuan naik ke peran politik, mereka mungkin berjuang dengan sikap diskriminatif yang mengakar dalam badan legislative akibat dari norma gender yang mengakar dalam (AK, 2019).

Selain itu, diskusi politik sering kali gagal memasukkan perspektif perempuan, yang dapat mengarah pada kebijakan yang tidak secara memadai membahas masalah atau hak-hak perempuan. Potensi transformatif representasi perempuan dihambat oleh kegagalan untuk menyediakan platform bagi perempuan di mana suara mereka dapat beresonansi dalam proses pengambilan keputusan inti (AK, 2019). Inisiatif harus

menekankan tidak hanya inklusi tetapi juga pemberdayaan melalui tindakan yang menargetkan hambatan struktural dalam organisasi politik (Syammaella et al., 2024).

Symbols and discourses – narasi politik dan simbol-simbol kampanye yang bias gender.

Dalam lanskap politik Indonesia, strategi kampanye sering kali menggabungkan simbol dan narasi gender yang mencerminkan sikap masyarakat terhadap perempuan. Narasi politik seputar kandidat perempuan sering kali mengacu pada peran gender tradisional, menggambarkan perempuan sebagai pengasuh atau advokat masyarakat sambil mengesampingkan kemampuan mereka sebagai pemimpin politik dan pembuat keputusan (Brooks & Hayes, 2019; Santoso et al., 2022). Penggambaran ini secara tidak sengaja dapat memperkuat stereotip, yang menunjukkan bahwa perempuan terutama cocok untuk peran pendukung daripada posisi kepemimpinan (Borges Martins da Silva & Gatto, 2021).

Misalnya, ketika kandidat perempuan mengadopsi strategi kampanye yang selaras dengan ekspektasi gender, seperti menekankan peran mereka yang berorientasi pada masyarakat daripada ambisi politik mereka, mereka mungkin awalnya menarik bagi pemilih perempuan (Aspinall et al., 2021). Namun, strategi semacam itu secara tidak sengaja dapat membatasi persepsi mereka untuk dipilih di antara pemilih yang lebih luas, yang mewujudkan sebuah paradoks di mana upaya perempuan untuk terhubung dengan pemilih berdasarkan pengalaman gender bersama secara bersamaan melanggengkan persepsi yang membatasi tentang peran politik mereka (Aspinall et al., 2021; Brooks & Hayes, 2019).

Lebih jauh lagi, praktik simbolis yang digunakan selama kampanye, seperti inisiatif “blusukan”, di mana para kandidat mengunjungi lingkungan sekitar untuk berinteraksi langsung dengan konstituen, juga

dapat memperburuk bias gender. Kandidat laki-laki mungkin lebih diuntungkan dari interaksi ini, terutama ketika interaksi tersebut memicu persepsi otoritas dan kepemimpinan yang sulit dibangun oleh kandidat perempuan dalam konteks yang sama (Naufal, 2022). Ketika para pemilih menyaksikan keterlibatan publik perempuan, mereka sering kali diteliti melalui sudut pandang gender yang menghukum mereka atas perilaku yang mungkin dirayakan jika dilakukan oleh rekan laki-laki.

Sementara simbol dan narasi yang berlaku dalam kampanye politik Indonesia dapat melanggengkan bias gender, perubahan strategis pada narasi ini dapat mendorong pemberdayaan yang lebih besar bagi kandidat perempuan. Misalnya, kampanye yang menekankan agensi perempuan, prioritas kebijakan, dan kompetensi kepemimpinan dapat mengkalibrasi ulang persepsi publik terhadap kandidat perempuan (Arfan et al., 2023; Huluba et al., 2018). Mengintegrasikan simbol kekuatan dan ketahanan ke dalam kampanye dapat menginspirasi kepercayaan tidak hanya di kalangan pemilih tetapi juga di kalangan perempuan yang bercita-cita untuk terjun ke dunia politik (Clayton et al., 2019; Gatto & Thome, 2020).

Penelitian juga menunjukkan bahwa perempuan yang mencalonkan diri sebagai perwakilan kepentingan perempuan dengan demikian mengaitkan pencalonan mereka dengan gerakan yang lebih luas untuk kesetaraan gender dapat memobilisasi dukungan lebih efektif daripada mereka yang tidak (Huluba et al., 2018). Dengan membongkar narasi mereka di sekitar tujuan kolektif dan perubahan masyarakat alih-alih menyesuaikan diri dengan peran tradisional, perempuan dapat terlibat lebih sukses dengan pemilih yang beragam, yang pada akhirnya meningkatkan peluang keberhasilan elektoral mereka (Arfan et al., 2023).

Interpersonal relations – pola interaksi elite politik yang sering kali eksklusif dan maskulin.

Interaksi di antara elit politik di Indonesia sering kali menunjukkan sifat 'homososial', di mana laki-laki lebih banyak terlibat satu sama lain, membangun jaringan yang memperkuat dominasi dan kendali mereka atas ruang politik (Bjarnegård & Kenny, 2016; Sihidi et al., 2019). Pola-pola ini berfungsi untuk meminggirkan perempuan, menciptakan lingkungan di mana perempuan menghadapi hambatan tidak hanya dalam lingkungan politik formal tetapi juga dalam jaringan informal yang penting untuk kemajuan politik.

Penelitian menunjukkan bahwa "kelekatan" jaringan yang didominasi laki-laki ini melanggengkan bias kelembagaan informal yang merugikan perempuan yang ingin memasuki arena politik (Bjarnegård & Kenny, 2016). Misalnya, patronase dan klientelisme politik praktik yang sering kali berpusat pada laki-laki dan tidak transparan dapat membatasi akses perempuan terhadap dukungan dan sumber daya politik yang diperlukan untuk pencalonan. Akibatnya, perempuan sering kali tidak dilibatkan dalam peran-peran penting kerangka kerja pengambilan keputusan, yang membatasi kemampuannya untuk mempengaruhi wacana politik dan pemerintahan (Lowndes, 2020).

Hubungan interpersonal di antara elit politik selanjutnya dicirikan oleh wacana politik maskulin yang membentuk narasi seputar keterlibatan dan kepemimpinan politik (Sihidi et al., 2019). Kandidat perempuan sering menghadapi tantangan yang tidak hanya berasal dari pengecualian tetapi juga dari bahasa dan budaya yang melemahkan upaya politik mereka. Contoh-contoh yang terdokumentasi menunjukkan bahwa perempuan yang berjuang untuk peran kepemimpinan dapat dikritik atau diberi label dengan cara yang memperkuat stereotip gender tradisional, yang berdampak negatif pada persepsi publik mereka dan memperumit

ambisi politik mereka (Krook & Mackay, 2011).

Penilaian kualitatif menyoroti bahwa upaya perempuan untuk menavigasi jaringan yang didominasi laki-laki ini sering kali mengakibatkan marginalisasi mereka, karena mereka sering dilihat melalui lensa gender yang menekankan peran tradisional daripada efektivitas politik (Lowndes, 2020). Wacana dalam pertemuan politik, kampanye, dan pertemuan partai cenderung memprioritaskan narasi laki-laki, menciptakan suasana di mana masukan perempuan diremehkan atau diabaikan sama sekali (Krook & Mackay, 2011). Hal ini memperkuat siklus eksklusif di mana partai politik secara tidak sengaja melanggengkan hambatan yang ingin mereka hilangkan melalui langkah-langkah kesetaraan gender (Verge, 2020).

Pola interaksi di antara elit politik menggarisbawahi bahwa mencapai kemajuan substansial dalam representasi perempuan tidak hanya memerlukan mekanisme formal seperti kuota tetapi juga perombakan menyeluruh jaringan informal dan norma budaya dalam lembaga politik (Kenny, 2014; O'Connor, 2020). Transformasi semacam itu memerlukan pengakuan terhadap struktur patriarki yang berlaku dan investasi dalam mengubah sifat maskulin wacana politik melalui pelatihan dan praktik inklusif (Abdul Manan et al., 2023).

Selain itu, keberhasilan politik perempuan akan bergantung pada pembongkaran hierarki kaku yang menjadi ciri interaksi politik saat ini. Menentang norma yang ada dan mempromosikan penghargaan terhadap kontribusi perempuan di setiap tingkat wacana politik sangatlah penting. Hal ini melibatkan pendefinisian ulang narasi yang mendominasi arena politik untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya dilihat sebagai peserta tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu memengaruhi perubahan yang berarti (Bolzendahl, 2014).

Internal mental work – bagaimana persepsi, norma, dan ekspektasi politik dibentuk oleh nilai-nilai gender.

Di Indonesia, nilai-nilai gender yang berlaku secara signifikan memengaruhi lanskap politik, sering kali mendikte siapa yang dianggap sebagai kandidat yang layak dan peran apa yang diharapkan dimainkan oleh pria dan wanita dalam pemerintahan (Aspinall et al., 2021; Radojevic, 2023). Gagasan tentang "pemimpin politik" sering kali berakar pada nilai-nilai maskulin tradisional yang mewujudkan ketegasan, otoritas, dan ketegasan, yang secara budaya dikodekan sebagai atribut laki-laki (Smith et al., 2012). Oleh karena itu, kandidat perempuan sering kali menghadapi skeptisisme mengenai kemampuan mereka, dianggap kurang kompeten atau kurang pantas dibandingkan rekan-rekan pria mereka hanya karena mereka tidak sesuai dengan harapan gender yang dominan (Folke et al., 2021; Radojevic, 2023).

Dampak persepsi gender bersifat multifaset, yang mengaitkan norma-norma masyarakat dengan sikap elit partai politik dan pemilih (Aspinall et al., 2021). Kehadiran Stereotip gender yang mengakar dalam wacana politik dapat menghambat pencalonan perempuan dengan menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat yang mengutamakan kualitas kepemimpinan laki-laki. Stereotip semacam itu menciptakan keraguan diri pada perempuan mengenai ambisi politik mereka, sehingga melanggengkan siklus kurangnya representasi (Gilardi, 2015).

Norma dan ekspektasi politik diperkuat melalui berbagai saluran, termasuk representasi media, dinamika partai, dan interaksi sosial dalam konteks politik. Pesan kampanye sering kali mencerminkan dan memperkuat norma gender ini, secara implisit mengomunikasikan kepada perempuan bahwa ambisi politik mereka harus selaras dengan peran tradisional, seperti pengasuhan atau layanan masyarakat, daripada menegaskan

diri mereka dalam posisi kepemimpinan (Fujimoto & Takemoto, 2023).

Lebih jauh lagi, dominasi laki-laki dalam narasi politik mengakibatkan kurangnya panutan perempuan dalam peran eksekutif, yang menghambat calon perempuan untuk melihat diri mereka sendiri dalam posisi kekuasaan dan wewenang yang sama (Latvala, 2014). Representasi perempuan dengan demikian dikontekstualisasikan dalam persepsi patriarki yang menyelaraskan kekuatan politik dengan maskulinitas, yang mengarah pada keyakinan yang terinternalisasi di antara perempuan bahwa partisipasi mereka mungkin tidak diinginkan atau tidak layak untuk dikejar (Fujimoto & Takemoto, 2023).

Meskipun ada hambatan-hambatan ini, terdapat potensi perubahan transformatif dalam narasi politik seputar representasi perempuan. Meningkatnya pengakuan atas agensi politik perempuan, yang didukung oleh pengenalan kuota gender dan gerakan akar rumput, tengah membentuk kembali lanskap politik, yang mendorong perubahan dalam sikap masyarakat (Folke et al., 2020). Perempuan yang menduduki posisi berkuasa dapat menjadi panutan, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak secara inheren terkait dengan gender dan menginspirasi perempuan lain untuk terlibat dalam proses politik (Eksi & Wood, 2019).

Selain itu, interaksi antara media sosial dan ranah politik publik dapat menjadi platform untuk mengubah persepsi gender. Kandidat perempuan yang mengadaptasi pesan mereka untuk menantang norma-norma tradisional dan menekankan kolaborasi, inklusivitas, dan inisiatif yang digerakkan oleh masyarakat dapat membentuk kembali narasi seputar peran perempuan dalam politik, yang mendorong persepsi kompetensi yang melampaui bias gender (Ahlstrand, 2021).

5. Kesimpulan

Konsep Gendered Institutions yang diperkenalkan oleh Joan Acker sangat relevan dalam memahami dinamika PILKADA 2024 di Indonesia. Meskipun terdapat peningkatan jumlah perempuan dalam politik, namun tantangan dalam kualitas partisipasi perempuan tetap ada, yang menandakan bahwa dominasi norma-norma dan praktik-praktik lembaga yang cenderung maskulin. Dalam konteks ini, lima dimensi yang diidentifikasi oleh Acker yaitu pembagian kerja, kekuasaan, simbol dan wacana, relasi interpersonal, serta kerja mental internal, menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis penyebab dan konsekuensi ketimpangan gender dalam politik. Pertama, pembagian kerja politik masih menempatkan perempuan dalam peran yang kurang strategis, yang cenderung menjerat mereka dalam posisi yang masih tingginya norma patriarki. Ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan yang memberikan kesempatan yang lebih setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang lebih strategis. Kedua, meskipun kuota gender telah diterapkan, tantangan terus berlanjut karena simbol dan narasi dalam kampanye politik sering kali bias gender. Perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi pendukung daripada pemimpin yang diharapkan, yang menciptakan penggambaran mereka sebagai figur yang lebih pasif, bukannya sebagai agen perubahan aktif yang berkontribusi dalam posisi kekuasaan. Ketiga, relasi interpersonal di kalangan elite politik juga berkontribusi terhadap penyingkiran perempuan dari jaringan kekuasaan.

Lingkungan di mana interaksi sering didominasi oleh laki-laki menciptakan hambatan akses yang lebih besar bagi perempuan. Hubungan yang tidak setara ini bukan hanya mengenai kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana perempuan mengevaluasi diri dan kemampuan mereka dalam konteks politik. Keempat, kerja mental

internal yang dipengaruhi oleh norma sosial dapat menciptakan keraguan dalam diri perempuan tentang kapasitas mereka untuk memimpin dan berpartisipasi secara aktif dalam politik. Normativitas sosial ini menuntut diubah agar perempuan bisa percaya diri dalam mengambil peran yang lebih besar dalam kebijakan publik. Reformasi politik yang mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa perwakilan perempuan dalam Pilkada tidak sekadar simbolis. Transformasi kelembagaan tidak hanya perlu menekankan pada aspek formal inklusi, tetapi juga harus mengatasi norma-norma patriarkal yang mengakar dalam struktur sosial dan politik. Hal ini mencakup penciptaan ruang-ruang inklusif, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik, serta promosi narasi yang lebih adil dalam kampanye politik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perempuan akan memiliki peluang yang lebih besar untuk tidak hanya hadir dalam politik, tetapi juga memimpin secara substansial, sehingga mendukung terciptanya keadilan gender dalam arena politik.

5. Referensi

- Abdul Manan, A. F., Md Nor, M. S., Adnan, Z. H., & Ismail, M. M. (2023). The Challenges in the Anti-Corruption Efforts by the Government Agencies in Southeast Asia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(18). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i18/19959>
- Acker, J. (1992). From Sex Roles to Gendered Institutions. *Contemporary Sociology*, 21(5), 565–569.
- Ahlstrand, J. L. (2021). Strategies of ideological polarisation in the online news media: A social actor analysis of Megawati Soekarnoputri. *Discourse & Society*, 32(1), 64–80. <https://doi.org/10.1177/0957926520961634>

- AK, G. (2019). Women's Empowerment In The Muslim World: Reconsidering Rights Of The "Commons." *The Journal of Social Science*, 3(5), 136–151. <https://doi.org/10.30520/tjsosci.518264>
- Alfirdaus, L. K., & Nugroho, R. W. (2019). Needed but Neglected: Women Activists as Vote Getters in Elections at the Local Level. *Jurnal Politik*, 5(1), 95. <https://doi.org/10.7454/jp.v5i1.246>
- Arfan, R., Azzahra, D., Suryanef, S., & Rafni, A. (2023). WOMEN'S Expansion In Regional Head Elections In Medan City 2020 (Case Study On The Akhyar-Salman Couple). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 8(2), 187. <https://doi.org/10.24198/jwp.v8i2.45892>
- Asmawi, M., & Devi, L. S. (2023). Women And Politics: Strategies In Optimizing Women's Representation In Banten Province Legislative Election Politics 2024. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 11(1), 29. <https://doi.org/10.31000/jhr.v11i1.8019>
- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Bjarnegård, E., & Kenny, M. (2016). Comparing Candidate Selection: A Feminist Institutional Approach. *Government and Opposition*, 51(3), 370–392. <https://doi.org/10.1017/gov.2016.4>
- Bolzendahl, C. (2014). Opportunities and Expectations. *Gender & Society*, 28(6), 847–876. <https://doi.org/10.1177/0891243214542429>
- Borges Martins da Silva, M., & Gatto, M. A. C. (2021). Stigmatized Campaign Practices and the Gendered Dynamics of Electoral Viability. *Journal of Politics in Latin America*, 13(3), 376–399. <https://doi.org/10.1177/1866802X211058739>
- Brooks, D. J., & Hayes, D. (2019). How Messages About Gender Bias Can Both Help and Hurt Women's Representation. *American Politics Research*, 47(3), 601–627. <https://doi.org/10.1177/1532673X18795608>
- Chatun, S. (2023). The Elusive 30%: Analyzing the Barriers to Female Representation in the Indonesian Parliament for East Nusa Tenggara (NTT). *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14168>
- Clayton, A., Josefsson, C., Mattes, R., & Mozaffar, S. (2019). In Whose Interest? Gender and Mass–Elite Priority Congruence in Sub-Saharan Africa. *Comparative Political Studies*, 52(1), 69–101. <https://doi.org/10.1177/0010414018758767>
- Cooper, R., Mosseri, S., Vromen, A., Baird, M., Hill, E., & Probyn, E. (2021). Gender Matters: A Multilevel Analysis of Gender and Voice at Work. *British Journal of Management*, 32(3), 725–743. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12487>
- Dzinnun, Y., Jubba, H., Azhar, M., & Qodir, Z. (2024). From global trends to local realities: understanding women's political involvement for Indonesia's democratic progress. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 180–193. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i1.14181>
- Eksi, B., & Wood, E. A. (2019). Right-wing populism as gendered performance: Janus-faced masculinity in the leadership of Vladimir Putin and Recep T. Erdogan. *Theory and Society*, 48(5), 733–751. <https://doi.org/10.1007/s11186-019-09363-3>

- Folke, O., Rickne, J., & Smith, D. M. (2021). Gender and Dynastic Political Selection. *Comparative Political Studies*, 54(2), 339–371. <https://doi.org/10.1177/0010414020938089>
- Frank, K., & Hou, F. (2015). Source-Country Gender Roles and the Division of Labor Within Immigrant Families. *Journal of Marriage and Family*, 77(2), 557–574. <https://doi.org/10.1111/jomf.12171>
- Fujimoto, S., & Takemoto, K. (2023). Revisiting the political biases of ChatGPT. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 6. <https://doi.org/10.3389/frai.2023.1232003>
- Galea, N., & Gaweda, B. (2018). (De)constructing the Masculine Blueprint: The Institutional and Discursive Consequences of Male Political Dominance. *Politics & Gender*, 14(2), 276–282. <https://doi.org/10.1017/S1743923X18000168>
- Gatto, M. A. C., & Thome, D. (2020). Resilient Aspirants: Women's Candidacies and Election in Times of COVID-19. *Politics & Gender*, 16(4), 1001–1008. <https://doi.org/10.1017/S1743923X20000537>
- Ghafoor, S. A., Ali, M., & Umer, F. (2023). Women Political Empowerment in Makran. *Journal of Social Sciences Review*, 3(2), 975–986. <https://doi.org/10.54183/jssr.v3i2.338>
- Gilardi, F. (2015). The Temporary Importance of Role Models for Women's Political Representation. *American Journal of Political Science*, 59(4), 957–970. <https://doi.org/10.1111/ajps.12155>
- Huluba, A.-M., Kingdon, J., & McLaren, I. (2018). The UK Online Gender Audit 2018: A comprehensive audit of gender within the UK's online environment. *Heliyon*, 4(12), e01001. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e01001>
- Kalembang, J. V. (2024). Potential for the 2024 Election and Consolidation of Indonesian Democracy. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 5(1), 17–23. <https://doi.org/10.47616/jamrsss.v5i1.409>
- Kenny, M. (2014). A Feminist Institutional Approach. *Politics & Gender*, 10(4), 679–684. <https://doi.org/10.1017/S1743923X14000488>
- Khoiriyah, N. (2020). A Long Road to a Gender Equality in the House of Representatives in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i10.7391>
- Kim, J. H. (2019). Direct Democracy and Women's Political Engagement. *American Journal of Political Science*, 63(3), 594–610. <https://doi.org/10.1111/ajps.12420>
- Krook, M. L., & Mackay, F. (Eds.). (2011). *Gender, Politics and Institutions*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9780230303911>
- Kunovich, S., & Paxton, P. (2005). Pathways to Power: The Role of Political Parties in Women's National Political Representation. *American Journal of Sociology*, 111(2), 505–552. <https://doi.org/10.1086/444445>
- Latvala, P. (2014). 'On Election Day the Husband Tied His Wife to a Table Leg to Stop Her from Voting': Political Narratives, Gender and Archived Heritage in Finland. *Folklore: Electronic Journal of Folklore*, 57, 117–140. <https://doi.org/10.7592/FEJF2014.57.latvala>
- Lowndes, V. (2020). How Are Political Institutions Gendered? *Political Studies*, 68(3), 543–564.

- <https://doi.org/10.1177/0032321719867667>
- Merdanović, A. V. H., & Delalić, S. (2023). The Impact of Electoral Gender Quotas on Women's Political Participation in Bosnia and Herzegovina. *Politics in Central Europe*, 19(4), 767–789. <https://doi.org/10.2478/pce-2023-0034>
- Naufal, M. F. (2022). Analysis of Gibran Teguh's Online Blusukan Campaign Strategy at The 2020 Solo Elections. *PERSPEKTIF*, 11(3), 984–989. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6656>
- Ningsih, S. A., Yandra, A., Ruslyhardy, & Sudaryanto. (2024). Riau Provincial General Election Commission's Efforts to Increase Political Participation of Disabled Voters in The 2024 Election. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 5(2), 140–147. <https://doi.org/10.31849/joels.v5i2.22422>
- Nourani, S., Seraj, F., Shakeri, M. T., & Mokhber, N. (2019). The Relationship Between Gender-Role Beliefs, Household Labor Division and Marital Satisfaction in Couples. *Journal of Holistic Nursing and Midwifery*, 29(1), 301–307. <https://doi.org/10.29252/hnmj.29.1.301>
- O'Connor, P. (2020). Accessing Academic Citizenship: Excellence or Micropolitical Practices? In *Gendered Academic Citizenship* (pp. 37–64). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52600-9_2
- Pancawati, D. (2025). *Potret Keterpilihan Perempuan di Pilkada 2024 Peningkatan partisipasi perempuan dalam Pilkada 2024*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/potret-keterpilihan-perempuan-di-pilkada-2024>
- Paxton, P., M., M., & Painter, M. (2010). Growth in women's political representation: A longitudinal exploration of democracy, electoral system and gender quotas. *European Journal of Political Research*, 49(1), 25–52. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2009.01886.x>
- Peng, Y. (2022). Gendered Division of Digital Labor in Parenting: A Qualitative Study in Urban China. *Sex Roles*, 86(5–6), 283–304. <https://doi.org/10.1007/s11199-021-01267-w>
- Popov Momčinović, Z. (2023). Women Activists and Women Parliamentarians as Actors of the Political Representation of Women in Bosnia and Herzegovina: What Claims, with what Successes? *Genero: Časopis Za Feminističku Teoriju i Studije Kulture*, 27(1), 145–175. <https://doi.org/10.18485/genero.2023.27.1.6>
- Purwanti, E., & Teti Hadiati. (2022). Enforcement of Norms of Women's Representation in The Regional House of Representatives of Pekalongan Regency, Period 2019-2024. *Asian Journal of Law and Humanity*, 2(1), 65–82. <https://doi.org/10.28918/ajlh.v1i2.5493>
- Radojevic, M. (2023). The Subjective Effects of Gender Quotas: Party Elites Do Not Consider “Quota Women” to Be Less Competent. *Politics & Gender*, 19(2), 349–372. <https://doi.org/10.1017/S1743923X22000137>
- Rahmanto, F., Purnomo, E. P., Kasiwi, A. N., & Salsabila, L. (2021). Women's Representation through Political Parties in Parliament Period of General Election 2019-2024. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(3), 336–359. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i1.22666>
- Rhoads, E. (2012). Women's Political Participation in Indonesia:

- Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 31(2), 35–56.
<https://doi.org/10.1177/186810341203100202>
- Riastri Haryani. (2023). The Implementation of Simultaneous Local Elections: An Overview of Constitutional Law and Its Impact on Democracy in Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(1), 102–113.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.262>
- Santoso, I. A. P., Wibowo, A. L. P., Zulfa, C. L., Siregar, N. N., & Sudisman, R. A. (2022). Classification of Majene Regency Landslide Prone Areas Using Geographic Information System and Storie Index. *Jurnal Geoelebes*, 6(1), 72–86.
<https://doi.org/10.20956/geoelebes.v6i1.19040>
- Shaheen, A. (2021). Socio Economic Barriers Restricting Women Participation in Local Government System in District Bahawalpur. *Pakistan Social Sciences Review*, 5(IV), 766–778.
[https://doi.org/10.35484/pssr.2021\(5-IV\)58](https://doi.org/10.35484/pssr.2021(5-IV)58)
- Sihidi, I., Khanifah, L., & Romadhan, A. (2019). The Politics of Gender in Indonesia's Political Parties. *Proceedings of the Third International Conference on Sustainable Innovation 2019 – Humanity, Education and Social Sciences (IcoSIHESS 2019)*.
<https://doi.org/10.2991/icosihess-19.2019.62>
- Sijapati, D. B., & Mishra, M. (2023). Nepal's Policies and Practices for Gender Equality. *National College of Computer Studies Research Journal*, 2(1), 65–78.
<https://doi.org/10.3126/nccsrj.v2i1.60083>
- Smith, A. R., Reingold, B., & Owens, M. L. (2012). The Political Determinants of Women's Descriptive Representation in Cities. *Political Research Quarterly*, 65(2), 315–329.
<https://doi.org/10.1177/1065912910395327>
- Soetjipto, A. W. (2023). Perempuan Muda dan Partai Politik: Dari Descriptive Participation menuju Substantive Representation. *Jurnal Perempuan*, 28(2), 87–100.
<https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.844>
- Syammaella, N. F., Farida, F., Harliantara, H., & Prihatiningsih, W. (2024). Self Interpretation: The Identity of Women Legislator. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8(2), 310–323.
<https://doi.org/10.25008/jkiski.v8i2.771>
- Tatli, A., Ozturk, M. B., & Woo, H. S. (2017). Individualization and Marketization of Responsibility for Gender Equality: The Case of Female Managers in China. *Human Resource Management*, 56(3), 407–430.
<https://doi.org/10.1002/hrm.21776>
- Thomas, J., & Bond, K. (2015). Women's Participation in Violent Political Organizations. *American Political Science Review*, 109(3), 488–506.
<https://doi.org/10.1017/S0003055415000313>
- Toyibah, D. (2017). Habitus, Agency and Political Participation of Female Students: A Study at an Islamic University in Indonesia. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 21(2), 113.
<https://doi.org/10.7454/mssh.v21i2.3506>
- Tuti, I. A. (2025). *Partisipasi Politik Perempuan Pada Pilkada 2024 ; Perempuan Tidak Sekedar Mau, Tapi Juga Harus Mampu*. Kpu.Go.Id.
<https://kab-tegal.kpu.go.id/blog/read/partisipasi-politik-perempuan-pada-pilkada-2024-perempuan-tidak-sekedar-mau-tapi-juga-harus-mampu>

- Umbase, R. S., Sumilat, G., & Mesra, R. (2023). Women's Suffrage in Indonesia: A Structural Analysis of Women's Representation in Parliament. *Technium Social Sciences Journal*, 49(1), 77–83. <https://doi.org/10.47577/tssj.v49i1.9783>
- Verge, T. (2020). Political party gender action plans: Pushing gender change forward beyond quotas. *Party Politics*, 26(2), 238–248. <https://doi.org/10.1177/1354068818766196>
- Wardani, S. B. E., & Subekti, V. S. (2021). Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 28–49. <https://doi.org/10.1177/1868103421991144>
- Williams, C. L., Muller, C., & Kilanski, K. (2012). Gendered Organizations in the New Economy. *Gender & Society*, 26(4), 549–573. <https://doi.org/10.1177/0891243212445466>
- Wiryono, S., & Setuningsih, N. (2025). *Partisipasi Perempuan Meningkatkan pada Pilkada 2024, 109 Orang Menang Kontestasi*. Kompas.Id. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/17/23065511/partisipasi-perempuan-meningkat-pada-pilkada-2024-109-orang-menang>
- Yandra, A. (2017). Fisibilitas Pilkada Serentak Tahap II Kota Pekanbaru Pasca PERMENDAGRI No.18 Tahun 2015. *Jurnal Niara*, 9(2). <https://media.neliti.com/media/publications/114494-ID-none.pdf>
- Yandra, A., Faridhi, A., Andrizal, A., & Setiawan, H. (2023). *How Can the Foundations of Democracy Be Weakened? Case Study of Inaccuracy and Independency of Election Data in Indonesia*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4419479>